



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARMANTO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 104532

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.214.000.000

1. Tanah Seluas 488 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 244.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/81 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 170.556.791**F. HARTA LAINNYA** Rp. 5.000.000**Sub Total** Rp. 2.566.056.791**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.566.056.791



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.